

RINGKASAN

RIFKI MULYA 237410101002 PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) LHOKSEUMAWE DALAM UPAYA DEPORTASI BAGI WARGA NEGARA ASING SUBJEK PERKAWINAN CAMPURAN (Dr. Malahayati, S.H.,LL.M. dan Dr. Muhammad Nasir, S.H.,LL.M)

Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Lhokseumawe memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di wilayah kerjanya. Salah satu fokus pengawasan adalah terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Meski perkawinan campuran merupakan hak asasi, namun status keimigrasian WNA yang bersangkutan tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal maupun penyalahgunaan status pernikahan.

Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana bentuk tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran, bagaimana pelaksanaan tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran serta kendala yang dihadapi dalam upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Kemudian mengumpulkan data hukum dan menganalisis data hukum tersebut serta diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara preskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, termasuk penanganan pelanggaran terkait izin tinggal melalui perkawinan campuran yang tidak sah, demi menjaga supremasi hukum dan kepentingan nasional. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melaksanakan peran strategisnya dalam penegakan hukum keimigrasian di wilayah Aceh Utara, Bireuen, dan Lhokseumawe dengan menangani pelanggaran izin tinggal melalui perkawinan campuran, menggunakan pendekatan intelijen keimigrasian dan tindakan administratif seperti deportasi yang cepat dan efisien sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe menghadapi berbagai kendala dalam upaya deportasi WNA yang terlibat perkawinan campuran, seperti kemudahan bebas visa, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat, namun terus melakukan penanggulangan melalui usulan selektivitas bebas visa, penambahan personel,

serta peningkatan kesadaran masyarakat demi memperkuat penegakan hukum keimigrasian secara optimal.

Adapun saran yang dapat diberikan ialah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe seharusnya memperkuat sistem digitalisasi dalam pengelolaan data keimigrasian guna mempercepat administrasi dan mengurangi kendala dalam menangani masalah keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe harus melakukan evaluasi dan peningkatan sistem administrasi serta penerapan teknologi informasi yang lebih efisien dalam pengelolaan data keimigrasian untuk meningkatkan kompetensi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan deportasi Warga Negara Asing (WNA) disarankan agar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe mengevaluasi kebijakan Bebas Visa, memperketat prosedur administrasi, serta meningkatkan kapasitas SDM dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperlancar proses deportasi WNA subjek perkawinan campuran.

Kata kunci: Peran, Imigrasi, Deportasi, Warga Negara Asing, Perkawinan.

ABSTRACT

RIFKI MULYA 237410101002 **THE ROLE OF THE CLASS II IMMIGRATION OFFICE AT THE IMMIGRATION CHECKPOINT (TPI) LHOKSEUMAWE IN DEPORTATION EFFORTS OF FOREIGN NATIONALS IN MIXED MARRIAGES (Dr. Malahayati, S.H.,LL.M. dan Dr. Muhammad Nasir, S.H.,LL.M)**

The Immigration Office of Class II Immigration Checkpoint (TPI) Lhokseumawe plays an important role in safeguarding the country's sovereignty by overseeing the movement of foreign nationals entering and exiting Indonesia, including in its jurisdiction. One of the key focuses of this supervision is on foreign nationals (WNA) who enter into mixed marriages with Indonesian citizens (WNI). Although mixed marriages are a human right, the immigration status of the foreign nationals involved must still comply with applicable legal provisions to avoid violations of stay permits or abuse of marriage status.

This study discusses the main tasks of the Immigration Office of Class II TPI Lhokseumawe in the deportation efforts for foreign nationals involved in mixed marriages, how these tasks are implemented, and the challenges faced in deporting foreign nationals involved in such marriages.

The research method used is empirical juridical research, involving field research. This study uses both primary and secondary data sources. Data is collected, analyzed, and processed qualitatively, with the results presented in a prescriptive-analytical manner.

The research findings indicate that, based on Law Number 6 of 2011 on Immigration and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2018, the Immigration Office of Class II TPI Lhokseumawe has an important role in immigration supervision and enforcement of immigration laws, including handling violations related to stay permits through unlawful mixed marriages, in order to uphold the rule of law and national interests. The Immigration Office of Class II TPI Lhokseumawe has carried out its strategic role in enforcing immigration laws in North Aceh, Bireuen, and Lhokseumawe by addressing stay permit violations related to mixed marriages, using an immigration intelligence approach and administrative actions such as fast and efficient deportation in accordance with Law Number 6 of 2011. The Immigration Office of Class II TPI Lhokseumawe faces various challenges in deporting foreign nationals involved in mixed marriages, such as the ease of obtaining a visa-free entry, limited human resources, and low community participation. However, efforts continue through proposals to selectively apply visa exemptions, increase personnel, and raise public awareness to strengthen the enforcement of immigration laws optimally.

The recommendations include strengthening the digitalization system in immigration data management to expedite administration and reduce obstacles in handling immigration issues. The Immigration Office of Class II TPI Lhokseumawe should evaluate and improve its administrative system, as well as implement more efficient information technology to enhance competence and

provide better services. To overcome challenges in the deportation of foreign nationals (WNA), it is recommended that the Immigration Office of Class II TPI Lhokseumawe evaluate the Visa-Free policy, tighten administrative procedures, and enhance human resource capacity and public socialization to facilitate the deportation process for foreign nationals involved in mixed marriages.

Keywords: Role, Immigration, Deportation, Foreign Citizens, Mixed Marriage